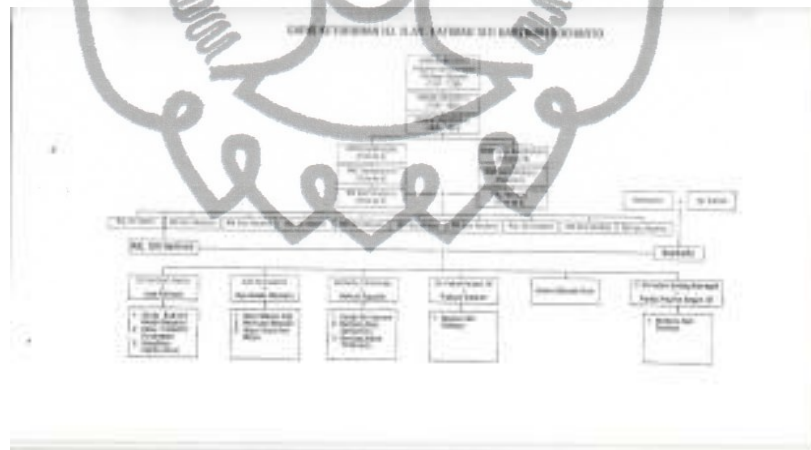


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum tentang Biografi Siti Hartinah

1. Silsilah Keluarga dan Leluhur Siti Hartinah

Siti Hartinah lahir di desa Jaten, Karanganyar pada tanggal 23 Agustus 1923 dan bertumbuh di sekitar karesidenan Surakarta. Berasal dari keluarga keturunan Mangkunegoro III raja Praja Mangkunegaran yang menjabat (1834-1853). Siti Hartinah lahir dari pernikahan RM. Soemoharjomo dengan R. Aj. Hatmanti pada tahun 1919. Ayahanda Siti Hartinah sebelum menjadi Wedana, mengawali karirnya sebagai seorang Mantri Gunung (camat) Nangsri di daerah Karanganyar (Gafur, 1993:70).



Gambar 4.1 Silsilah Keluarga Siti Hartinah

Sumber: Sugiono. MP, 1996: 217.

Sejak tahun 1847 Residen Surakarta Baron de Geer telah mengusulkan kepada Mangkunegoro III Wonogiri menjadi salah satu dari 3 kawedanan. Seorang Onder Regent/Bupati Anom yang dipercaya memimpin Kawedanan sejak 1900 ialah Raden Mas Ngabehi Haryokusumo, eyangnya Siti Hartinah, kemudian dilanjut ayahandanya R.M. Soemoharjomo (Gafur,

2. Riwayat Pendidikan

Menerima pendidikan di rumah yang diberikan sedini mungkin berupa budi pekerti, kerukunan, tanggungjawab, tolong menolong, saling ngemong, dan kesetiakawanan. Sifat populis Siti Hartinah gemar turun tangan kebawah meneladani sang Ayah yang seorang Wedana. Berbeda dengan wedana sebelumnya Ayahanda Siti Hartinah bersama Ibu, dan anak-anak justru sangat merakyat (Gafur, 1993: 45). Siti Hartinah kecil sebagai puteri Kepala Desa tidak memiliki batasan ketika bermain dengan teman-teman seusianya. Untuk pertama kalinya Siti Hartinah mengenyam pendidikan formal di sekolah *Ongko Loro* atau Sekolah Dasar dua tahun. Namun hanya berjalan satu tahun, setelahnya Siti Hartinah dirawat kerabat ayahandanya yang seorang polisi bernama Abdul Rachman dari Solo dan kemudian melanjutkan sekolah di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS). Pendidikan Siti Hartinah berhenti hanya sampai disini saja, karena ayahnya telah pensiun setelah ia tamat HIS.

3. Riwayat Organisasi

Perspektif tentang wanita Jawa bahwa wanita ialah kependekan dari - *wani ditata* dalam filosofi orang jawa yang artinya urusan perempuan adalah *konco wingking* urusannya sebatas *masak* (memasak), *macak* (berhias), *manak* (beranak) (Hermawati, 2007: 20). Siti Hartinah yang berlatar belakang wanita Jawa yang masih keturunan dari keluarga raja Mangkunegara, masih memegang erat nilai-nilai kebudayaan Jawa. Namun ketika Siti Hartinah beranjak remaja situasi mengubah kebudayaan yang ada. Perempuan-perempuan Jawa kini dituntut turun ke dalam masyarakat dan ikut berjuang memukul mundur sisa-sisa kolonialisme untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Dilatih menjadi wanita yang kuat sebagai garda terdepan berjuang melawan segala bentuk penjajahan di bumi. Tindakan yang dilakukan Siti Hartinah meruntuhkan Filosofi Jawa bahwa wanita adalah *wani ditata*. Siti Hartinah membuktikan bahwa perempuan mampu lebih berdaya.

Siti Hartinah terinspirasi dari perjuangan kaum wanita sebagai sosok yang heroik pada masa pergerakan beberapa pendekar wanita seperti: Tjut Nyak Dien, Christina Martha Tijahahu, Dewi Sartika, Kartini, Rasuna Said, Rahmah el Yunusiah dan lainnya merupakan bukti nyata keikutsertaan para pahlawan wanita yang sama-sama didorong rasa semangat memperjuangkan keadilan dan rasa cinta bangsa. Terutama Kartini sosok yang merintis pembebasan kaumnya dari kegelapan menjadi titik terang melalui pendidikan, sampai saat ini yang menjadikan sinar kian menjadi terang benderang. Hal ini yang menjadikan landasan tujuan berbagai gerakan wanita di Indonesia (Notopuro, 1979:15).

John Naisbitt dan Patricia Aburdene, dua orang futurologi kaliber meramalkan dalam bukunya “*Megatrends 2000*” menurutnya pada abad ke-21, akan menjadi zaman perempuan mengambil peranan dan kepemimpinan yang menonjol dalam berbagai bidang. Ibu Siti Hartinah memiliki kecenderungan terhadap hal ini. Menurut pandangannya Siti Hartinah mengatakan:

“memang akan banyak muncul pemimpin-pemimpin wanita di masa datang. Sesuai dengan apa yang telah saya utarakan, bahwa bagi wanita Indonesia, hak, kedudukan, dan kewajiban secara hukum terjamin. Namun, kembali kepada kaum wanita itu sendiri. Jikalau, wanita itu mampu memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, berpandangan jauh ke depan dan dipercaya oleh masyarakat tentu akan mampu memegang jabatan-jabatan penting di segala bidang kehidupan. Meskipun demikian saya ingin ingatkan bahwa yang diperjuangkan oleh wanita di Barat sifatnya kadang-kadang lain dengan keadaan kita di sini. Kita masih memikirkan dan menekankan soal keibuan dan tugas-tugas khusus kewanitaan. Saya mengharapkan mudah-mudahan wanita Indonesia tidak berubah sifat keibuannya, jangan ikut-ikutan dengan cara mereka yang tidak cocok dengan kepribadian kita” (Gafur, 1993: 314-315).

Siti Hartinah mengawali dengan aktif pada JPO (*Javaansche Padvinder Organisatie*) yang merupakan organisasi kepanduan. Selanjutnya mengikuti anak organisasi wanita bentukan Jepang *Fujinkai* yaitu Barisan Pemuda Putri Indonesia yang berupaya mempertahankan kemerdekaan. Barisan Pemuda Putri Indonesia mengajarkan cara baris berbaris, latihan kepemimpinan, berwawancara dengan tokoh, hingga latihan berpidato berbekal pada

pengetahuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Siti Hartinah berdialog dengan Ki Hajar Dewantoro, hal tersebut menumbuhkan pemahaman tentang arti kemerdekaan suatu bangsa. Siti Hartinah kembali ke Surakarta dengan semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan pasca lenyapnya *Fujinkai* dan Barisan Puteri Indonesia, hingga tumbuh Pemuda Puteri Indonesia. Siti Hartinah menjadi salah seorang pendirinya bersama enam putri Solo lainnya yaitu Soedijem, Sajem, Ismarsijah, Mardinijah, Supardijatmi, dan Soeharmi setelah diproklamasikan kemerdekaan, pada tanggal 11 Oktober 1945 terlahir organisasi Laskar Putri Indonesia sebagai bentuk perjuangan (Republika, 29 April 1996).

Mendirikan suatu badan harus melalui tahap perizinan terlebih dahulu, pertemuan dengan Mayor Soeharto langsung mendapat dukungan. Siti Hartinah menemui Komandan *Plaasteljk Militair Commandant* Surakarta yang dijabat Kapten Mardoyo perihal perizinan. Pasukan tempur bernama Laskar Putri Indonesia berjumlah 200 orang memiliki 120 pucuk senjata sebagai satu pasukan tempur yang dikagumi, dan disegani semua pihak. Siti Hartinah sendiri duduk dibagian staf mulai dari mengurus perlengkapan logistik yang dibutuhkan pasukan kemiliteran, hingga merawat prajurit yang luka-luka dan juga tidak segan membersihkan lantai, kamar mandi, WC, dan lainnya. Bagi Siti Hartinah pertolongan harus diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan laki-laki ataupun perempuan, tanpa membedakan bangsa, asal daerah, suku, keturunan, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Siti Hartinah menyatakan bahwa: “dalam perjuangan untuk merebut, menegakkan, dan mempertahankan kemerdekaan nasional itu kaum wanita ikut tampil ke garis depan perjuangan” (Gafur, 1993: 101).

Berjuang menjadi relawan menghantarkan Siti Hartinah bertemu dengan Letnan Kolonel Soeharto yang kala itu bertugas. Melalui perijodohan Bu Prawiro yang tidak lain adalah Ibu angkat dari Soeharto mengunjungi kediaman Siti Hartinah di Solo untuk menanyakan kepada Siti Hartinah apakah setuju jika bersanding dengan Mas Harto. Siti Hartinah menyetujui, dilanjutkan

pernikahan antara Siti Hartinah dan Soeharto pada tanggal 26 Desember 1947. Siti Hartinah memulai babak baru menjadi isteri seorang prajurit ditengah keadaan negara masih menghadapi ancaman Agresi Militer Belanda, dan hidup dalam kesulitan. Siti Hartinah memulai kehidupannya menjadi PERSIT (Persatuan Istri Tentara) menjadi wadah melanjutkan idealisme dan pengabdianya kepada nusa dan bangsa. Siti Hartinah siap menerima resiko menjadi isteri tentara yang harus berpindah dari rumah ke rumah, ditinggal berbulan-bulan karena tugas (Gafur, 1993: 135).

Agresi Militer II Belanda berakhir ditandai dengan adanya Perundingan 'Roem-Royen' pada tanggal 28 Januari 1949 untuk segera menghentikan tembak-menembak kemudian turut serta ikut dalam KMB (Konperensi Meja Bundar). Serangan Umum pada tanggal 1 Maret 1949 dilakukan pihak TNI dengan begitu mendadak, dan secara kilat berdampak memukul mundur pimpinan dan pasukan Belanda. Selama 6 jam TNI menduduki Yogyakarta dengan mengibarkan bendera kebangsaan Merah Putih dengan rakyat yang ikut bersorai, 'Merdeka!' (Gafur, 1993: 150). Terjadi gencatan senjata dan kembalinya Pemerintah RI ke Yogya, dipersiapkan penarikan tentara Belanda dari Yogya yang sudah harus mengosongkan sebelum tanggal 29 Juni 1949. Setelah peristiwa itu Siti Hartinah baru dapat bertemu Soeharto kembali dengan keadaan anak pertama yang telah lahir dan sudah menginjak usia 4 bulan (Gafur, 1993:153).

Perpindahan dari Salatiga ke Solo Siti Hartinah dan Soeharto pada tanggal 1 Maret 1953 karena menjadi Komandan Resimen 15. Keadaan masih terasa sulit begitulah keluhan dari istri-istri tentara, kekurangan setiap bulannya terasa menjadi beban. Berangkat dari hal tersebut Siti Hartinah berupaya menggerakkan istri-istri tentara untuk menambah penghasilan. Berbekal keterampilan yang Siti Hartinah miliki sejak remaja di Wuryantoro yaitu kepandaian membatik, hal tersebut diturunkan oleh ibunya. Produk hasil membatik lalu dijual kepada para langganan untuk meringankan beban rumah tangga (Gafur, 1993: 182). Siti Hartinah salah satu istri anggota Kostrad yang

tidak setuju akan adanya latihan sukarelawati saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September. Siti Hartinah berpendapat “Kalau para istri menjadi sukarelawati, siapa yang mengurus keluarga dan anak-anak”. Sebagai gantinya Siti Hartinah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat diantaranya keterampilan wanita, pengetahuan umum, kesehatan, keluarga berencana, dan lainnya. Siti Hartinah selalu menggembleng kepada perihal pendidikan dan kemandirian. (Gafur, 1993:191). Kemandirian Siti Hartinah tercermin dari kegiatannya yang dilakukan selama mengandung masih bersemangat memberi perhatian, berkegiatan, dan turut serta berorganisasi. Siti Hartinah dipercaya oleh pimpinan Pusat Persit untuk mengetuai Panitia Kongres ke VIII di Jakarta (Gafur, 1993: 194).

Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 situasi menunjukkan ketegangan. Aksi massa bermunculan diantaranya Aksi Pengganyangan Gestapu PKI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan kesatuan aksi lainnya yang menuntut “Bubarkan PKI”. Berkumandangnya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yaitu berisi bubarkan PKI, turunkan harga, dan rombak kabinet Dwikora. Menjadi cikal bakal lahirnya Surat Perintah 11 Maret sebab keadaan telah *chaos*. Kemelut ekonomi, permasalahan dibidang ideologi, politik, sosial budaya, dan militer, kini menjadi tanggung jawab suami Siti Hartinah (Gafur, 1993: 220). Menjadi jembatan bagi Siti Hartinah untuk lebih berdedikasi melalui pembangunan bangsa dengan kapasitas baru sebagai Ibu Negara.



Gambar 4.2 Siti Hartinah dan Keluarga (1967)

Sumber: Sugiono. MP, 1996: 297.

Siti Hartinah menjadi Ibu Negara di usianya ke-44 tahun. Sebelum menjadi Ibu Negara, Siti Hartinah sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan dan organisasi wanita. Siti Hartinah menjadi bagian Ikatan Keluarga Staf Hankam dan Rukun Ibu Ampera. Siti Hartinah menjadi lebih sibuk pada kurun waktu 1967-1968 karena menjalankan tugasnya sebagai Ibu Negara. Siti Hartinah semakin dikenal dan menjadi perhatian publik karena selalu mendampingi Presiden Soeharto kemanapun bertugas dalam setiap kunjungan hingga ke pelosok Tanah Air, sampai mengunjungi lokasi-lokasi banjir. Memperkenalkan diri langsung kepada rakyat dengan bertegur sapa sehingga dikenal dengan baik oleh rakyat (Gafur, 1993: 231).

B. Latar Belakang Siti Hartinah dalam pemberdayaan masyarakat pada Program Keluarga Berencana

1. Menjadi Ibu Negara

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru dimana sang suami Soeharto menjabat sebagai Kepala Negara, saat itu juga Siti Hartinah menjabat sebagai Ibu Negara. Siti Hartinah sebagai Ibu Negara senantiasa mendampingi suaminya

commit to user

kala bertugas sebagai Presiden diberbagai kegiatan. Sebagai Ibu Negara, Siti Hartinah sebagai perempuan yang mendorong, menggerakkan kaum wanita untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Siti Hartinah Soeharto turut serta menyumbangkan pemikirannya diberbagai bidang kesehatan, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan mewujudkannya kedalam proyek pembangunan besar. Siti Hartinah merupakan perempuan yang berusaha membantu pembangunan dan memberdayakan masyarakat (Anderson, 1973:64).

Mengingat besarnya penduduk berdasarkan (Sensus Penduduk 1971, Biro Pusat Statistik) yang mana seharusnya menjadi potensi terhadap masyarakat sebagai tenaga kerja (sumber daya manusia) namun harus ditingkatkan lagi mutu dan penempatannya untuk dapat mencapai kualitas hidup yang layak bagi individu laki-laki dan perempuan beserta keluarganya (Menurut Hidayat dikutip oleh Adam Malik, 1989: 9) pernyataan tersebut mengisyaratkan diperlukan kunci untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pendekatan pembangunan melalui sumber daya manusia dengan adanya pembangunan sosial-ekonomi, yang didasari pada: (a) peningkatan sumber daya manusia: tingkat pendidikan (pendidikan formal, non-formal, dan informal), tingkat kesehatan, dan gizi, apresiasi terhadap berpikir rasional serta disiplin kerja. (b) memperbesar kesempatan kerja, memperbaiki tingkat upah, memperbaiki perlindungan kerja. (c) mengembangkan orientasi kelembagaan yang mendukung usaha pembangunan (Malik, 1989:9).

Pemecahan masalah dan penanggulangan masalah penduduk menjadi program dengan penanganan yang lebih lanjut. Bahwasannya pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan masalah jangka panjang. Kebijakan kependudukan dalam waktu jangka panjang bertujuan menurunkan angka tingkat kelahiran setidaknya-tidaknya separuh dari tingkat dewasa, untuk mencapainya dilakukan melalui usaha pengintegrasian tujuan menurunkan angka kelahiran ke dalam program pembangunan dan membuat kebijaksanaan kependudukan sebagai tujuan integral dari kebijaksanaan pembangunan. Tujuan

jangka Panjang yang dimaksud adalah mempengaruhi penyebaran penduduk melalui usaha transmigrasi dan pembangunan daerah agar penyebaran penduduk lebih serasi dengan pemanfaatan optimal terhadap sumber daya di Indonesia (Notopuro, 1979: 85).



Gambar 4.3 Kunjungan Presiden Soeharto, didampingi Siti Hartinah.

Sumber: Abdul Gafur, 1993: 352.

Siti Hartinah dalam pidato-pidato sambutan menekankan bahwa pembangunan adalah kepentingan utama yang dibangun melibatkan kaum wanita untuk mengantarkan kepada kesejahteraan. Perananan wanita yang paling dasar ialah mendidik anak-anak tumbuh menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Peningkatan Kaum wanita perlu meningkatkan pendidikan, karena pendidikan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kaum wanita agar lebih kreatif yang diperlukan untuk menjawab berbagai masalah keluarga sehari-hari (Sekretariat Kabinet Periode 1966-1971 No, 383).

Pendidikan bagi Siti Hartinah bukan hanya perihal ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih dari itu juga mencakup soal pembentukan watak, karakter, moral, kecintaan terhadap alam dan lingkungan, serta peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Republika, 2 Mei 1996). Harus disadari betapa pentingnya pendidikan dalam rumah tangga. Karena pelaksanaan Keluarga

Berencana dilakukan dengan cara sukarela serta mempertimbangkan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikator keberhasilan program keluarga berencana juga berdasarkan dari cakupannya pemimpin yang dapat mengidentifikasi masalah beserta penyelesaiannya. Menjadi paling penting yaitu bukan banyaknya jumlah akseptor namun keikutsertaan masyarakat dalam program KB (Haluan, 1977: 8 kol 4). Selain itu dengan upaya lain yaitu dengan usaha penyebaran penduduk melalui sarana transmigrasi dalam meningkatkan kegiatan pembangunan terhadap masyarakat secara merata. Penanganannya resmi dibawah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sesuai Keputusan Presiden No. 59 tahun 1978. Bertujuan agar program Keluarga Berencana untuk mensejahterakan ibu dan anak, dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran, bersamaan dengan usaha mengendalikan pertumbuhan penduduk.

2. Memberdayakan Organisasi Perempuan

Siti Hartinah berupaya memperjuangkan hak perempuan untuk ikut berjuang dalam pembangunan tanpa adanya kesenjangan terhadap perempuan, yang artinya dengan menjunjung tinggi nilai persamaan antara perempuan dan laki-laki (Adam Malik, 1973: 3). Siti Hartinah menekankan:

“dalam kita sibuk berorganisasi dan memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan, sudah pada tempatnya apabila ibu para anggota Dharma Wanita tetap memperhatikan hakekat dan kodrat sebagai wanita yang memikul kewajiban mulia sebagai ibu rumah tangga dan pendidik utama anak-anak kita. Namun demikian, jelas bukan berarti bahwa hanya di “garis belakang” lah bidang kegiatan ibu-ibu. Pengabdian dan kewajiban membangun masyarakat memang tidak mengenal perbedaan antara pria dan wanita”

Peranan Siti Hartinah dalam upaya memberdayakan masyarakat sejak remaja telah mendedikasikan dirinya untuk negeri yang ditempati, tanpa memandang status gender apapun lakukan dan memperjuangkan hak suatu bangsa untuk bebas dari bentuk segala penjajahan. Menjadi Ibu Negara yang merangkul kaum perempuan untuk senantiasa maju sejak zaman kemerdekaan

tampaknya kegiatan yang tidak akan putus dari kehidupannya. Kaum perempuan dari zaman ke zaman berbeda bentuk perjuangannya. Siti Hartinah Soeharto ingin menjadikan perjuangan yang ada di masa lalu sebagai bahan bakar perjuangannya pada masa Orde Baru bukan berarti apa-apa jika melepaskan sejarah perjuangan kaum perempuan di masa lalu (Gafur, 1993: 98).

Ibu Siti Hartinah telah berperan untuk negara sejak sebelum masa pembangunan, beliau menjadi penegak kemerdekaan dan pertahanan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Siti Hartinah aktif dalam Pemuda Putri Indonesia mengikutsertakan dirinya kongres wanita di Surakarta pada tanggal 24 -26 Februari 1946. Akhirnya Surakarta menjadi tempat lahirnya Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Organisasi secara substansial mengambil dasar dari pancasila. Berangkat dari 3 masalah, perkara hukum perkawinan, tenaga kerja wanita, dan kesehatan serta sosial. Menekankan pada kesejahteraan terhadap organisasi-organisasi wanita, perananan dan perjuangan wanita, tekanan masalah kesejahteraan keluarga yang mana hal ini sejalan dengan tujuan dari program Keluarga Berencana (KB). Sebelum menjadi Ibu Negara, Siti Hartinah telah menjadi penggagas pada organisasi Ikatan Keluarga Staf Hankam dilahirkan dengan tujuan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan keluarga bagi anggotanya. Ibu Siti Hartinah untuk melancarkan program-program Orde Baru dibantu oleh para istri di Kabinet Ampera. Menggagas ide untuk mempersatukan dan mengakrabkan hubungan para istri di Staf Hankam, dibentuk organisasi IKKA (Ikatan Kesejahteraan Keluarga ABRI). Ketua umum organisasi baru ini langsung dijabat oleh Ibu Siti Hartinah, menjabat (1966-1973). Program-programnya menitik beratkan kepada masalah kesejahteraan. Menyesuaikan dengan kebijakan reorganisasi ABRI didirikan Dharma Wanita pada tahun 1974. Sebagai Ibu Negara Siti Hartinah dijadikan pedoman dan perhatian karena keahliannya dalam berorganisasi diperoleh banyak pandangan dan saran pada proses pembentukkannya. Mengerti betul permasalahan yang ada di masyarakat, secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pemikiran Presiden Soeharto. (Gafur, 1993: 319-321).



Ucapan selamat dari Ibu Tien Soeharto dalam acara pelantikan sebagai Menteri Urusan Peranan Wanita tanggal 20 November 1987

Gambar 4.4 Ucapan Selamat Siti Hartinah kepada Ny. Lasijah Sutanto (1987)

Sumber: Abdul Gafur

Era pemerintahan Orde Baru oleh Soeharto diangkat seorang Menteri Muda khusus menangani Urusan Peranan Wanita. Siti Hartinah berpesan kepada Ibu Lasijah untuk selalu membina PKK (Gafur, 1996: 95) sebagai wadah untuk menampung sumbangan pikiran bagi pemerintah dan masyarakat. Kaum wanita perlu mengerti, menyadari, menghayati eksistensi kedudukannya dan menunjukkan kepada masyarakat. Perananan kaum wanita adalah tidak kalah pentingnya dengan kaum pria guna membangun kesejahteraan bangsa dan negara (Setwapres Umar Wirahadikusuma No. 501). Siti Hartinah membuka jalan bagi perempuan Indonesia lainnya untuk semakin berdaya. Pemerintahan Orde Baru mengangkat tokoh wanita, Ny. Lasiah Sutanto sebagai Menteri Muda Urusan Perananan Wanita dalam Kabinet Pembangunan III tahun 1978. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan wanita Indonesia di masa lalu, dengan peranan dan perjuangan yang berbeda. Namun pada dasarnya perjuangannya sama bernilainya demi kesejahteraan masyarakat (Setwapres Adam Malik No 979).

Siti Hartinah sebagai tokoh masyarakat memiliki tekad untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memunculkan perkumpulan dan organisasi yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program kependudukan Keluarga Berencana. Organisasi-organisasi tersebut antara lain terdiri dari organisasi wanita, karyawan, pemuda, pelajar, mahasiswa, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya. Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, organisasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Kegiatan penyuluhan (Penerangan motivasi)

Kegiatan penerangan motivasi memiliki kedudukan penting dalam mempercepat tercapai keberhasilan program. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti Siti Hartinah atau pemerintah saja, melainkan perlu dilakukan oleh masyarakat. Organisasi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penerangan motivasi. Penerangan motivasi yang dapat dilakukan dengan cara kunjungan rumah ke rumah, pertemuan-pertemuan, ceramah, diskusi atau seminar, kegiatan kesenian, bulletin atau majalah.

a. Kegiatan dalam bidang Pendidikan/Latihan

Organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan pendidikan atau Latihan bagi pemimpin atau kader organisasi memasukkan masalah kependudukan keluarga berencana di dalam kurikulum. Hal tersebut menciptakan kesadaran tinggi untuk mengambil bagian dalam mensukseskan program kependudukan keluarga berencana. Organisasi-organisasi dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti kursus atau Latihan yang diselenggarakan oleh BKKBN atau instansi terkait.

b. Kegiatan pelayanan medis

Organisasi-organisasi masyarakat yang mampu dan memiliki fasilitas-fasilitas dapat melaksanakan kegiatan pelayanan medis, dengan menyelenggarakan Klinik Keluarga Berencana. Dalam penyelenggaraannya organisasi masyarakat bersinergi dengan BKKBN dan instansi Kesehatan

dalam izin Klinik Keluarga Berencana. Untuk mensukseskan kegiatan tersebut dilakukan dengan dua pendekatan:

- a) Pendekatan keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Pendekatan kebijaksanaan kependudukan yang terpadu, dengan cara melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil yang Bahagia dan sejahtera baik melalui aparatur pemerintah maupun melalui mekanisme sosial budaya yang hidup dalam masyarakat (Entjang, 1981: 37-43).

Berdasarkan laporan BKKBN dalam Repelita ke-2 pada tahun 1982 bahwa gerakan dan partisipasi aktif diberbagai kegiatan oleh kaum wanita sangat efektif dapat meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana di lapangan. Adanya gerakan-gerakan organisasi wanita diantaranya Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi dalam meningkatkan partisipan keluarga berencana. Program dari organisasi-organisasi wanita terus dibina dan ditingkatkan mutunya. Dikembangkan terus menerus kemudiandian diintegrasikan melalui jalur Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga mencapai tujuan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kegiatan-kegiatan dibidang kependudukan terus ditingkatkan karena mengingat rendahnya pengetahuan dan meningkatnya angka partisipasi masyarakat sehingga dibutuhkan dukungan dan pengayoman kesejahteraan. Koordinasi diberbagai bidang seperti bidang kesehatan, pertanian, sosial, pendidikan, tenaga kerja, dan transmigrasi serta lingkungan instansi pemerintahan, swasta serta organisasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut dikembangkan usaha untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala hal, baik dalam kesertaan sebagai pemakai alat kontrasepsi maupun sebagai motivator atau penggerak dan pengelola program KB dilingkungannya masing-masing. Sehingga peranan masyarakat menjadi besar dan bertanggung jawab atas keberhasilan program keluarga berencana. (Wirahadikusumah, 275: 14).

Siti Hartinah mengundang semua istri menteri kabinet ke kediamannya di Jalan Cendana 8 Jakarta, dengan membahas pokok utama. Pertama mempererat hubungan antara anggota dan keluarga Kabinet Ampera, kedua membantu suami mensukseskan program kabinet dan ketiga, menaikkan derajat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rukun Ibu Ampera (RIA) resmi berdiri pada tanggal 24 September 1966, berangkat dari masalah kenakalan remaja, timbul karena kurangnya perhatian orangtua, mengalirnya urbanisasi ke Jakarta disertai minimnya fasilitas rekreasi bagi kaum remaja di Ibu Kota yang semakin padat penduduknya. Diambil inisiatif untuk membangun suatu taman rekreasi bagi anak-anak, remaja, dan orangtua. Bidang pendidikan menjadi perhatian utama bagi RIA Pembangunan, Ibu Negara: Siti Hartinah memutuskan mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak di Sentani dengan daya tampung 100 murid. Pemberian gelar-gelar 'Teladan' diberikan kepada guru, transmigran, dosen, dokter, peserta KB, mahasiswa, ibu-ibu penggerak PKK, bertujuan memberikan semangat untuk tetap konsisten terhadap apa yang mereka perjuangkan (Gafur, 1993: 331).



Gambar 4.5 Pertemuan dengan Anggota DPR Wanita (1973)

Sumber: Foto Humas Sekneg

Siti Hartinah selama menjadi Ibu Negara banyak menerima tamu organisai-organiasi wanita, (Kowani, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi,

commit to user

Organisasi Wanita Islam, Kristen dan Katholik, Budha serta Hindu, organisasi fungsional seperti IWAPI, Himpunan Wanita Karya, dan lain sebagainya). Salah satunya penerimaan Siti Hartinah atas kunjungan Anggota DPR Wanita di rumah kediaman Jl. Cendana 8. Siti Hartinah bersama anggota DPR wanita membahas masalah wanita khususnya dan keluarga umumnya. Penggerak PKK dari daerah-daerah, para istri gubernur dan bupati seluruh Indonesia, selain itu pembukaan musyawarah nasional, lokakarya, seminar atau pertemuan. Siti Hartinah selalu tampil ditengah-tengah mereka untuk memberikan sambutan pengarahan yang mengandung dorongan, motivasi, serta nasihat-nasihat (Setwapres Adam Malik No. 979). Nyonya-nyonya Bupati/ Wali Kota Kalimantan Timur melakukan kunjungan yang dipimpin Ny. Abdul Wahab Zachrono dalam rangka meninjau proyek-proyek PKK di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahan sebagai studi banding untuk penerapan di wilayah masing-masing (Indonesia Raya, 1973: 1).

Konferensi-konferensi dihadiri dari nasional hingga badan-badan internasional yang bergerak dibidang kesehatan, donor darah, pendidikan, dan lainnya. Siti Hartinah selalu memberikan pidato sebagai contoh dalam pertemuan Inter Regional tentang peranan organisasi wanita dalam usaha pembangunan kesehatan (November 1987) di Istana Merdeka:

bangsa-bangsa yang maju terus membangun untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. Bangsa-bangsa yang sedang membangun – termasuk bangsa kami – juga sedang bekerja keras membanting tulang dan memeras keringat membangun dirinya untuk mengejar berbagai keterbelakangan dan meraih kemajuan, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Belajar dari pengalaman sejarah berbagai bangsa, kami merumuskan tujuan pembangunan kami sebagai pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Dari sekian banyak hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan kami tadi, masalah kesehatan merupakan salah satu masalan yang teramat penting. Sebab disamping sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesempatan kerja, maka kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa derajat kesehatan yang baik, mustahil masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Gafur, 1993: 269).

C. Peranan Siti Hartinah dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Keluarga Berencana

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dengan meraih penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terlepas dari kaum perempuan yang turut berpengaruh. Siti Hartinah sebagai Ibu Negara dalam program keluarga berencana yang menjadi urgensi pemerintah memberikan suportif berupa motivasi-motivasi kepada masyarakat dan kaum perempuan khususnya. Siti Hartinah memberi motivasi melalui seminar maupun media massa terhadap organisasi-organisasi wanita (Dharma Wanita, KOWANI, Dharma Pertiwi, IKKA, Penggerak PKK, organisasi wanita Islam, dan lain sebagainya) turut mensukseskan KB di Indonesia, sehingga menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya. Penghargaan diberikan kepada peserta KB Lestari Tahun 1989 sebagai bentuk keberhasilan dan apresiasi (Sekneg Seri Pidato Presiden Soeharto tahun 1966-1998 No. 1243.4). Peranan Siti Hartinah dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana adalah sebagai motivator, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Seminar

Hal ini berkat adanya kehadiran dari Siti Hartinah sebagai Ibu Negara dan motivator dalam seminar KOWANI memberi semangat baru untuk mengawali jalannya program Keluarga Berencana (KB) memberikan sambutan tentang *Family Life Education*. Beberapa hal penting disampaikan pada sambutan mengenai edukasi keluarga berencana. Siti Hartinah mengatakan bahwa:

“banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan keluarga, yaitu watak perorangan, baik yang dibawa sewaktu lahir maupun yang dibentuk pada waktu masih dalam asuhan orang tua dan pada waktu mengalami masa puber, pendidikan ilmiah dan rohaniyah, keadaan sosial, ambisi pribadi, perkembangan kemajuan ilmu dan djaman, meningkatja kebutuhan, muntjulnya anggota-anggota keluarga baru seperti anak dan lain-lainnja, ternjata mempunyai pengaruh terhadap pembinaan keluarga. Siti Hartinah berperanan memberi dukungan dan penghargaan, terutama terhadap warga negara yang ikut serta mensukseskan program keluarga berencana, wanita-wanita Indonesia, terutama ibu-ibu anggota organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI yang mana bertugas sebagai wadah kegiatan positif seluruh wanita Indonesia” (Hartinah, 1970: 3).

Menurut Siti Hartinah sebagai motivator, perlunya bantuan dari organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI untuk pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Pelaksanaan program KB pada periode ini anggota masyarakat bertumbuh membentuk kelompok wadah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program KB. PPKBD kegiatannya adalah membantu memberikan penerangan serta pelayanan ulang kontrasepsi pil dan kondom serta mencatat kesertaan ber-KB dari PUS yang ada di wilayahnya. Perkembangannya semakin besar dengan layanan PPKBD, kelompok-kelompok peserta KB semakin tak terbatas sehingga lebih mudah dalam pembinaan kelestarian ber-KB para anggota (BKKBN, 1990).

Dirumuskan dalam GBHN bahwa Program KB Nasional bertujuan ganda, yaitu untuk menjadikan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Percepatan pelaksanaan program KB melibatkan partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui berbagai organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat menjadi pendekatan paling cocok dengan aspirasi dan keinginan masyarakat (Suparyono, 1990: 50).

Program Keluarga Berencana Nasional pada periode pembangunan ini memiliki tujuan yaitu tercipta, melembaga, dan membudayanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Keluarga Berencana bertujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan pengendalian dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Berdasarkan kepada evaluasi periode pembangunan terdahulu, aspirasi masyarakat yang berkembang di lapangan serta usaha memahami jiwa dari landasan struktural program yaitu Keppres nomer. 64 tahun 1983 (Suyono, 1984: 2).

Salah satu persoalan penting yang selalu ditekankan Siti Hartinah dalam pidatonya berkaitan dengan “Masalah Penduduk” adalah program

commit to user

“Keluarga Berencana”. Bukan hanya dimaksudkan untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk untuk kenaikan pendapatan per jiwa penduduk, namun program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu khususnya, yang akan berdampak pula terhadap keluarga. Keluarga Berencana tidak hanya berarti pada pencegahan jumlah anak yang terlalu besar, namun memaknai akan pentingnya merencanakan kelahiran anak berdasarkan pada pelaksanaan *family planning*. Keluarga Berencana bukan hanya sekedar menentukan anak yang direncanakan namun disesuaikan dengan kesehatan Ibu dan kemampuan keluarga (Suara Karya, 1989: 3).

Siti Hartinah kerap kali memberikan motivasi terhadap perempuan, esensi khususnya terhadap kaum ibu. Ibu Negara Siti Hartinah hadir sebagai panganjur dan motivator KB. Bahwa disampaikan oleh beliau fungsi sebagai ibu menurut Siti Hartinah:

“sesuai dengan fungsi utama kita sebagai ibu rumah tangga, saya rasa, pembinaan keluarga sakinah terbina cinta mesra antara suami dan istri serta kasih sayang antara orang tua dan anak. Karena itu kita harus merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Bagi kaum wanita kelanjutan dan peningkatan pembangunan itu merupakan kepentingan yang utama, sebab hanya pembangunan yang berhasillah yang dapat menghantarkan kaum wanita kepada kesejahteraan. Hanya pembangunan yang berhasillah yang dapat memberikan kesempatan kepada kaum wanita khususnya dan kaum ibu yang bertanggung jawab, untuk melahirkan anak-anak yang sehat untuk mendidik anak-anak dengan baik, untuk menghantarkan putra-putri bangsa ini menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Hartinah, 1970:1). KB adalah bagian dari usaha untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan Keluarga Berencana adalah untuk memperbaiki kesejahteraan Ibu dan Anak untuk kebahagiaan keluarga, untuk kemakmuran seluruh bangsa. Ibu yang terlalu sering melahirkan anak, lebih-lebih dalam jangka waktu yang berdekatan, tentu kurang sehat jasmaninya dibandingkan dengan mereka yang jarang melahirkan. Jumlah anak yang sedikit lebih memungkinkan ibu mencurahkan perhatian cinta-kasih yang lebih besar, serta memperhatikan pendidikan dan pertumbuhan mereka. Oleh karena itu dengan keluarga berencana kaum ibu berkesempatan lebih banyak untuk membesarkan dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kita merasa bersyukur, bahwa pemuka-pemuka agama di Indonesia membenarkan

KB sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang bersangkutan” (Hartinah, 1970:1).

2. Media Massa

Perempuan Indonesia meneruskan langkah perjuangan pada masa pembangunan diwarnai kegembiraan, pasalnya Ibu Negara turut serta langsung bersamaan perempuan yang berjuang untuk pembangunan Orde Baru. Peranan aktif Ibu Negara kerap tampil mendukung perempuan Indonesia sebagai pemberi motivasi dan dorongan melalui lisan maupun perbuatan nyata. Menginisiasi organisasi bersama perempuan-perempuan yang memiliki visi yang sama yaitu untuk membuat perempuan Indonesia lebih berdaya. Siti Hartinah Soeharto berkegiatan diberbagai pembukaan kongres, musyawarah nasional, musyawarah kerja, dan muktamar organisasi-organisasi wanita. Ibu Negara yang senantiasa hadir turut mengajak kaum perempuan untuk ikut mengambil peranan dalam pembangunan khususnya perihal kesejahteraan sosial seperti keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, olahraga, agama, kecantikan, pentingnya ASI, dan kebiasaan menabung. Siti Hartinah sangat memperhatikan peningkatan pengetahuan dan pendidikan bagi kaum wanita. Menurut Siti Hartinah, hanya ibu-ibu terdidik dan berpengetahuan yang dapat melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. *Dan hanya warga negara yang baik akan dapat membangun bangsa dan negaranya secara baik pula*, tutur Siti Hartinah (Kompas, 18 Desember 1992).

Kehadiran Siti Hartinah dari daerah ke daerah memberikan motivasi terhadap program keluarga berencana menjadi semangat bagi masyarakat yang dikunjunginya. Kota Medan salah satunya pertemuan dengan para anggota Badan Organisasi Wanita (BKOW) menyatakan bahwa perlu melakukan gerakan hemat, pandai menentukan prioritas kebutuhan rumah tangga dan disiplin sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan. Siti Hartinah berbicara mengenai Ibu Rumah Tangga dan kaum wanita pada umumnya. Siti Hartinah mengatakan apabila kaum wanita adapat melakukan sifat-sifat diatas akan dapat menciptakan tata tertib dalam berumah tangga yang berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat yang bahagia serta sejahtera. Pendidikan dalam lingkungan keluarga diperlukan terutama bagi kaum ibu yang memegang peranan penting. Menurut Siti Hartinah organisasi wanita dapat mengambil bagian untuk memberi petunjuk-petunjuk praktis dari pembinaan keluarga menuju pembinaan bangsa. Siti Hartinah menegaskan perihal KB bukan perihal mengurangi angka kelahiran saja, tetapi untuk membina suatu keluarga sejahtera yang dalam rangka sebenarnya sehingga mencapai bangsa yang sejahtera, masyarakat adil dan makmur. Karena KB merupakan tanggung jawab setiap keluarga didalamnya (Indonesia Raya, 1973: 1).

Siti Hartinah pada pembukaan Seminar Keluarga Berencana oleh KOWANI di Ruang Sidang DPRD DKI Jaya mengatakan bahwa KB jangan ditujukan kaum Ibu saja, bapak juga perlu. tujuan keluarga berencana ialah sejahtera ibu dan anak kebahagiaan keluarga dan kemakmuran bangsa, sehingga program keluarga berencana benar-benar program nasional. Siti Hartinah berharap kepada pimpinan BKKBN dan para ahlinya, agar mendidik para jajarannya untuk benar-benar ahli dalam bidangnya, karena hal tersebut sehingga mendapat kepercayaan dimata masyarakat. Misalnya dalam cara memberikan tablet, pemasangan spiral, dan cara penggunaan alat-alat lainnya. Menurut Siti Hartinah jika tidak memulai program keluarga berencana saat ini, maka pada tahun 2000 penduduk Indonesia akan berjumlah 250 juta orang. Siti Hartinah mengakui tidak mudah untuk mensukseskan keluarga berencana dalam waktu yang singkat, karena mengingat adat istiadat yang berkembang bahwa banyak anak banyak rejeki. Dikatakan bahwa tanpa bantuan kaum bapak program keluarga berencana juga tidak akan berhasil, dikarenakan peranan kaum bapak sangat besar dalam rumah tangga (Indonesia Raya, 1973: 1 bersambung ke-hal VIII kol.3-4).

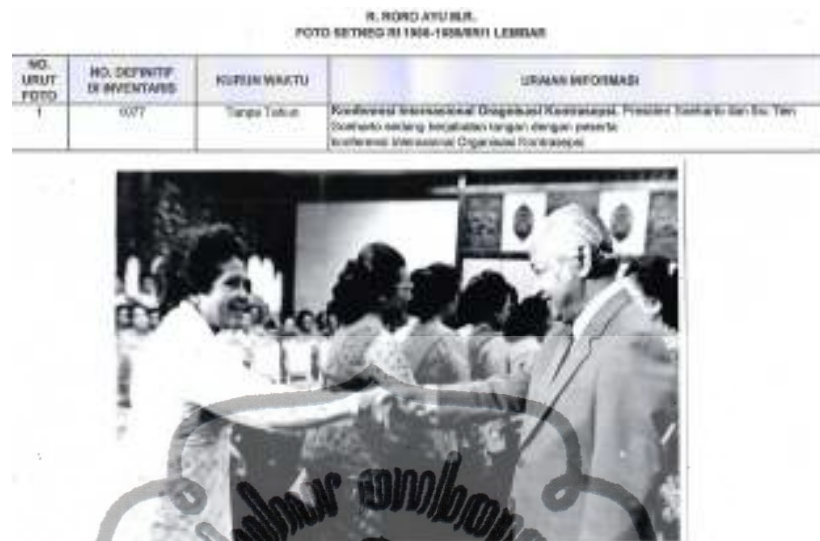
Siti Hartinah memberikan perhatian lebih terhadap program keluarga berencana berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga didalamnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dikarenakan dengan melaksanakan keluarga berencana artinya setiap keluarga dapat

mengatur jumlah anak sesuai dengan keinginan dan mengatur jarak anak yang satu dan berikutnya sehingga terjamin kesehatan, kehidupan, pendidikan, dan masa depannya karena sudah seharusnya menjadi tanggungjawab orangtua menentukan hal-hal tersebut. Program keluarga berencana lebih banyak menyangkut kepentingan dan kebahagiaan keluarga, terutama kepentingan ibu dan anak (Sekretariat Kabinet Periode 1966-1971 No.383 - Naskah siaran RRI, 17 Nopember 1970)

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk mensejahterakan ibu dan anak, dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran, bersamaan dengan usaha mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dilakukan dengan cara sukarela serta mempertimbangkan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikator keberhasilan program keluarga berencana juga berdasarkan dari cakupannya pemimpin yang dapat mengidentifikasi masalah beserta penyelesaiannya. Menjadi paling penting yaitu bukan banyaknya jumlah akseptor namun keikutsertaan masyarakat dalam program KB (Haluan, 1977: 8 kol 4). Selain itu dengan upaya lain yaitu dengan usaha penyebaran penduduk melalui sarana transmigrasi dalam meningkatkan kegiatan pembangunan secara merata. Penanganannya resmi dibawah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sesuai Keputusan Presiden No. 59 tahun 1978.

3. Konferensi Internasional

Siti Hartinah sebagai Ibu Negara memberikan perhatian terhadap kegiatan kenegaraan, terlebih pada kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Ketertarikan dengan masalah perempuan, Siti Hartinah hadir memberi jabatan tangan dalam Konferensi Internasional Organisasi Kontrasepsi seperti yang diketahui besarnya kepedulian beliau terhadap masalah keluarga berencana.



Gambar 4.7 Konferensi Internasional Organisasi Kontrasepsi (1966-1989)

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Langkah perjuangan perempuan Indonesia pada masa pembangunan diwarnai kegembiraan, pasalnya Ibu Negara turut serta langsung bersama perempuan yang berjuang untuk pembangunan Orde Baru. Peranan aktif Ibu Negara kerap tampil mendukung perempuan Indonesia sebagai pemberi motivasi dan dorongan melalui lisan maupun perbuatan nyata. Menginisiasi organisasi bersama perempuan-perempuan yang memiliki visi yang sama yaitu untuk membuat perempuan Indonesia lebih berdaya. Kegiatan Siti Hartinah Soeharto diberbagai kegiatan, pembukaan kongres, musyawarah nasional, musyawarah kerja, dan muktamar organisasi-organisasi wanita. Ibu Negara yang senantiasa hadir turut mengajak kaum perempuan untuk ikut mengambil peranan dalam pembangunan khususnya perihal kesejahteraan sosial seperti keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, olahraga, agama, kecantikan, pentingnya ASI, dan kebiasaan menabung (Gafur, 1993: 310). Siti Hartinah menyampaikan terhadap kaum wanita untuk tidak lupa kodratnya sebagai kaum wanita adalah fungsinya sebagai ibu (Sekretariat Kabinet Periode 1966-1971 no.383).

Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional memiliki strategi sebagai kunci keberhasilan yaitu aktif dan tegas berkomitmen mulai dari pemimpin

pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Sosok pemimpin pemerintahan tidak luput dari Presiden Soeharto beserta Ibu Negara Siti Hartinah yang selalu mendampingi, dan memberi perhatian terhadap permasalahan Keluarga Berencana. Relasi yang baik dengan merangkul pemuka agama dan budayawan sebagai strategi kebijakan. Adanya perwakilan dari BKKBN pusat bertujuan untuk membimbing dan membuat keputusan di setiap provinsi, mengubah konsep tradisional menjadi komunitas dengan adanya relawan dari desa dan akseptornya sebagai motivator dalam pendistribusian yang berkelanjutan, pengintegrasian program dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kegiatan pengembangan lainnya.

| No. | Tahun | Perkembangan | Keluarga Berencana |
|------|-----------|--|--------------------|
| I. | 1970 | Diresmikan BKKBN | |
| II. | 1971-1979 | Tingkat I Penyebaran dan pertumbuhan Keluarga Berencana. | |
| III. | 1979-1984 | Tingkat II Pemeliharaan dan Keterlibatan Masyarakat. | |
| IV. | 1984-1986 | Alih Kelola, Keluarga Berencana Penduduk Kota, Transisi | |
| V. | 1987 | Keluarga Berencana Mandiri | |

Tabel 4.1 Perkembangan Keluarga Berencana 1970-1989

Sumber: Setneg Seri Pidato Presiden Soeharto No.1210

Perjalanan untuk menjadi KB Mandiri yang memiliki arti menjadi akseptor diluar paksaan namun inisiatif sendiri ditujukan kepada akseptor KB dan diluar akseptor, diharuskan sudah dapat bertanggungjawab terhadap keluarganya sendiri untuk menerapkan metode keluarga berencana. Berikut penjelasan perkembangan yang terjadi selama tiga tingkat tahapan:

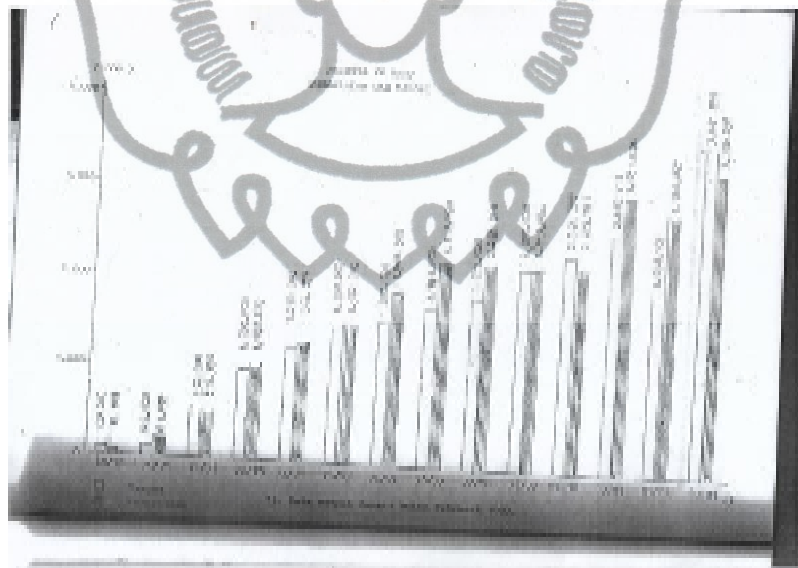
Tingkat I : Dikatakan bahwa selama 10 tahun pertama program keluarga berencana yang dimaksudkan untuk akseptor-akseptor baru. Diutamakan terhadap penduduk di pulau Jawa dan Bali karena populasi yang cukup besar diantara pulau lainnya di Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengikutsertakan jaringan komunitas pada skala daerah hingga nasional, mulai dari organisasi desa hingga nasional yaitu seperti Ibu-Ibu PKK, Pos KB/Paguyuban KB, dan kelompok Ibu-Ibu lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan pada keluarga berencana untuk memiliki keluarga kecil, bahagia, sejahtera, dengan normalnya dua anak. Hasilnya di tingkat I menurut indikator keberhasilan KB yang ditinjau dari meningkatnya jumlah akseptor dan bekerjasama mendukung KB.

Tingkat II : Pada tingkat kedua program KB dikonsentrasikan pada usaha perbaikan. Meningkatnya jumlah akseptor yang mengikuti program disetiap hari. Banyaknya aktivitas program untuk memobilisasi tim keluarga berencana dan meningkatkan kunjungan tim medis, karena kegiatan KB terintegrasi dengan aktivitas kesehatan, bahwasannya KB menjadi bagian utama keseluruhan gambaran keluarga. Indikator keberhasilan pada tingkat II ini dilihat dari angka aktifnya akseptor, dengan diadakannya apresiasi KB Lestari untuk meningkatkan loyalitas akseptor.

Tingkat III : Tingkat tiga bisa dikatakan sebagai tingkat pencapaian terhadap KB, dimana akseptor dapat mengatur dan bertanggungjawab sendiri terhadap keluarga berencana sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi menjadikan tercapainya KB Mandiri (Suyono, 1987: 20-21).

Sesuai dengan yang dikatakan Siti Hartinah tujuan, sasaran, dan kebijakan menjadi salah satu segi dari masalah penduduk adalah Program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana tidak hanya dimaksudkan untuk

mengurangi kecepatan pertumbuhan penduduk namun juga menaikkan pendapatan perkapita, selain itu program ini bermanfaat bagi peningkatan Kesehatan ibu khususnya, dan keluarga pada umumnya. Kesehatan dalam Keluarga Berencana tidak hanya usaha yang berperikemanusiaan akan tetapi penting bagi pertumbuhan perekonomian dan hidup kemasyarakatan yang sehat (Notopuro, 1979:85). Menurut catatan Biro Pusat Statistik tahun 1971 seluruh penduduk Indonesia 119,2 juta yang terdiri dari kaum laki-laki 59,1 dan kaum perempuan 60,1 juta yang 32,1% diantaranya berumur 10 tahun keatas termasuk angkatan kerja. Ditinjau dari tempat atau lokasi kerja maka lebih dari sepertiga kaum perempuan yang bekerja di daerah kota dalam bidang jasa-jasa (sebagai guru, perawat, bidan, pembantu rumah tangga, sedangkan sepertiga lebihnya dalam perdagangan, rumah makan, hotel, dan lain-lain) serta di daerah pedesaan bagian terbanyak dari kaum wanita bekerja dalam bidang pertanian (67,88%) (Notopuro, 1979:87).



Gambar 4.7 Pencapaian & Target: Peserta KB Baru (Tahun 1984)

Sumber: Laporan BKKBN Tahun 1984

Menurut laporan BKKBN target peserta KB sebesar 100.000 namun baru tercapai sebesar 53.103 peserta. Hingga pada akhir periode Pelita I dari target sebesar 1.000.000 peserta kemudian mencapai 1.078. 889 peserta. Melihat dari angka yang melampaui target pada tahun ke 5 menunjukkan bahwa adanya

antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta KB. Program KB dalam kurun waktu satu periode berhasil mendinamisasikan potensi masyarakat, sehingga menimbulkan tingginya partisipasi masyarakat. Program Keluarga Berencana ini juga diselenggarakan secara teratur dan terencana sesuai dengan tujuan dan sasaran (BKKBN, 1984).

Pada periode ke 2 Repelita diharapkan mencapai target sebesar 1.250.000 dari 1.369.077, angka yang terus bertambah sejak 4 tahun program KB diresmikan. Kenaikan angka peserta KB berkat semakin besarnya anggota yang dilayani PPKBD. Kenaikan tersebut berdasarkan pada target perluasan jangkauan, pembinaan, pelembagaan dan pembudayaan di masyarakat (BKKBN, 1984). Berdasarkan laporan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional melaporkan hasil kinerja selama Pelita III sampai dengan bulan Januari 1984. Hasil kerja BKKBN dengan unit-unit pelaksana dan masyarakat membuahkan hasil mengajak sebanyak 16,2 juta peserta KB baru, artinya terdapat 110,2% dari target yang ditetapkan selama Pelita III. Dari peserta-peserta yang telah ada sebelumnya dengan tambahan peserta KB baru, maka secara nasional terdapat peserta KB aktif sebanyak 14 juta atau 57,3% dari jumlah pasangan usia subur yang ada.

Peserta KB yang berhasil diajak selama Pelita III mempunyai kualitas yang bertambah baik. Diindikasikan dari usia rata-rata peserta menurun dari 29,5 di awal Pelita III menjadi 25 tahun pada akhir Pelita III. Demikian dengan rata-rata anak para peserta KB pada periode yang sama menurun dari 3,8 menjadi 2,6. Buah hasil dari program-program pembangunan, keberhasilan dari jumlah peserta KB memberikan dampak penurunan tingkat fertilitas total (TFR) dari 5,6 menjadi 4 atau suatu penurunan 28,6% dari keadaan tahun 1970/1971. Perhitungan angka kelahiran kasar atau CBR telah menurun dari 44 perseribu pada tahun 1970/1971 menjadi 32 perseribu atau turun sebesar 27% (Suyono, 1984:4).

Memasuki masa periode ini secara resmi KB Mandiri diresmikan oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini. Program KB Mandiri menjadi *trend* dengan adanya kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang dimaksudkan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan KB dengan

commit to user

logo Lingkaran Biru. Hal tersebut bertujuan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB ([Sejarah BKKBN](#)). Menurut (Suparyono, 1990:52-53) Program KB menjadi Gerakan Masyarakat berkat dorongan motivasi dan di bawah dedikasi kepemimpinan karena ingin memperbaiki suatu keadaan yang kurang baik, dengan semangat serta keyakinan untuk mencapai kemuliaan. Gerakan Masyarakat Memperoleh keberhasilan fundamental, diantaranya:

- a) Tercapainya komitmen yang tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b) Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan berkembang sangat maju sehingga para akseptor bukan yang menunggu pelayanan melainkan mencari pelayanan sebagai kebutuhan. Hingga pertengahan tahun anggaran 1987/1988 jumlah peserta KB baru sekitar 31%, sedangkan peserta KB Mandiri penuh sekitar 10-15%.
- c) Terus menurunnya angka rata-rata anak yang dilahirkan hidup per wanita yang pernah kawin, yaitu 2.64% pada tahun 1980 menjadi 1.75% pada tahun 1985.

Keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya keterpaduan antara kesadaran masyarakat dan pentingnya KB. Partisipasi masyarakat yang terus meningkat, bukan karena ajakan para petugas KB namun atas kesadaran sendiri dan dengan biaya sendiri. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa KB telah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang penting (Suparyono, 1990: 58).

Diperoleh suatu gambaran dari pernyataan Kepala BKKBN Dr. Haryono Suyono bahwa adanya hubungan nyata antara kependudukan dan kesehatan masyarakat. Awalnya usaha-usaha dalam bidang masyarakat telah dapat menekan kelahiran manusia dengan penemuan baru dalam bidang kedokteran serta menurunkan tingkat risiko kematian Ibu pada saat melahirkan. Sehingga berdampak terhadap kesejahteraan keluarga dan perekonomian di Indonesia. Pemerintah tidak memaksakan untuk membatasi kelahiran manusia namun dengan adanya program keluarga berencana diberikan kesadaran-kesadaran terhadap masyarakat oleh akseptor. Akseptor memiliki peranan penting untuk memberikan pengetahuan dan motivasi terkait keluarga berencana terhadap masyarakat. Masyarakat pada masa ini telah mencapai kemandirian dalam melaksanakan

program KB karena atas dasar inisiatif. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri penghargaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia bukan semata rekayasa, namun prestasi nyata. *PBB tentu memberikan penghargaan yang didasarkan penelitian mereka tentang apa yang dicapai Indonesia dalam bidang kependudukan.* Pembangunan yang dilakukan terhadap kependudukan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghargaan, namun benar adanya mengingat permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang dapat dikatakan rumit (Suara Karya, 1989:3).

